PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL

Rynalto Mukiwihando

Politeknik Keuangan Negara STAN

wihando@pknstan.ac.id

ABSTRACT

Diterima Pertama

[11 Maret 2020]

Dinyatakan Diterima

[20 Maret 2020]

KATA KUNCI:

[Tata Kelola, Desentralisasi Fiskal]

Indonesia has embarked fiscal decentralization policy for more than 20 years. While the results are still varying across the regions, governance seems to be one of the causes of existing condition. The study analyze the impact of governance to the link between General Allocation Fund (DAU) and Gross Domestic Product (GDP). Employing governance indicator from kemitraan in 2012, this research compares the relationship within good governance province (east Java) and bad governance provinces (Papua and West Papua). This study results argue that governance matters in achieving fiscal decentralization objectives. Another result also confirm that education level has positive connection fiscal decentralization outcomes only in province with good governance indicator.

Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dengan hasil yang masih bervariasi belum sesuai di berbagai daerah. Beberapa studi mengindikasikan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh faktor tata kelola dari masing-masing pemerintahan daerah. Studi ini menganalisis pengaruh dari tata kelola terhadap hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Menggunakan data indeks tata kelola dari kemitraan.or.id pada tahun 2012, penelitian ini menguji pengaruh variabel tata kelola pada daerah dengan indeks tata kelola baik (Jawa Timur) dan daerah dengan tata kelola buruk (Papua dan Papua Barat). Hasil studi menunjukkan bahwa tata kelola memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Hasil yang lain juga mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan bagi PDB hanya pada daerah yang memiliki tata kelola yang baik.

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perjalanan Indonesia dalam mengarungi proses desentralisasi fiskal sudah mendekati dua dasawarsa. Hingga kini berbagai upaya terus dilakukan dalam mencapai tujuan utama dari penerapan program desentralisasi fiskal, mulai dari penajaman fungsi hingga upaya untuk meminimalisir dampak negatif tak terduga yang terjadi dari program ini. Menjelang usia ke 20 ini, desentralisasi fiskal memasuki fase *"no turning point"* dimana pilihan yang ada tidak lagi berupaya untuk kembali kepada masa *"sentralisasi"* yang lampau, namun tetap melaju di jalur desentralisasi dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan terus menerus (*continous improvement*).

Hasil penelitian atas keberhasilan program desentralisasi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang menunjukkan dampak positif dari desentralisasi salah satunya diperlihatkan oleh Sabilla dan Jaya (2014). Penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional namun memiliki pengaruh positif juga terhadap tenaga kerja. Berbeda dengan penelitian di atas, Pepinsky dan Wihardja (2011) berargumen bahwa keragaman ekstrim dalam hal faktor bawaan, imobilitas dan pelemahan tata kelola (*governance*) menyebabkan tidak tercapainya tujuan desentralisasi fiskal di negara berkembang seperti Indonesia. Patunru (2014) juga berkesimpulan bahwa faktor tata kelola (*governance*) adalah penentu keberhasilan pembangunan daerah. Pada tingkat yang lebih luas penelitian Rajkumar and Swaroop (2008) selaras memperlihatkan bahwa terdapat hubungan positif antara *governance* dengan tercapainya tujuan belanja publik.

Berdasarkan kondisi diatas, studi untuk melihat sejauh mana keberhasilan program desentralisasi fiskal di Indonesia masih sangat menarik untuk dilakukan. Hal ini juga perlu diperdalam dengan mengamati apakah faktor tata kelola memiliki pengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan desentralisasi fiskal yaitu diantaranya pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Tujuan utama dari desentralisasi adalah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave (1983),

desentralisasi akan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat sehingga dampak yang akan muncul adalah pelayanan publik yang lebih baik dan lebih akuntabel, adanya kerelaan masyarakat membayar pelayanan yang diberikan serta arah pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up*). Desentralisasi di Indonesia meliputi pelimpahan kewenangan tugas dan urusan serta pelimpahan kewenangan sumber pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam makalah ini desentralisasi yang dimaksud adalah desentralisasi fiskal atau pelimpahan kewenangan dalam hal sumber pendanaan atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Secara lebih jauh desentralisasi fiskal terbagi menjadi tiga yaitu: kewenangan pungutan, transfer dari APBN dan kewenangan pinjaman. Transfer dari APBN sendiri meliputi Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Pembahasan pada tulisan ini akan spesifik menyoroti Dana Insentif Daerah sebagai upaya terobosan dalam mekanisme penyaluran transfer APBN untuk mencapai tujuan utama desentralisasi yaitu perbaikan pelayanan publik untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Saat ini kondisi tata kelola di Indonesia masih terbelang lemah. Hal ini ditunjukkan dengan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2017 yang digolongkan sebagai kategori rendah dan berada di peringkat 98 dari 180 negara yang disurvei. Menurut *datatransparency.org*, indeks persepsi Indonesia berada di level 37 dari skala 0-100. Indeks mendekati 0 mengindikasikan korupsi suatu negara semakin tinggi sedangkan mendekati angka 100 menunjukkan semakin bersih dari korupsi. Banyaknya kasus korupsi di sektor politik dan penegakan hukum membuat indeks persepsi Indonesia masih rendah. Dibandingkan dengan Selandia Baru yang mendapat skor tertinggi (89), indeks persepsi korupsi Indonesia tertinggal 52 poin. Sementara dibandingkan dengan Somalia yang memiliki skor terendah (9), hanya selisih 28 poin. Namun demikian, indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami perbaikan menjadi 37 pada 2017 dibanding 32 pada 2012. Di tingkat ASEAN, persepsi korupsi Indonesia kalah dibanding Singapura, Malaysia

maupun Brunei Darussalam namun masih lebih baik dari Thailand maupun Vietnam.

Pada tahun 2012, data *governance index* (Indeks Tata Kelola) dari Kemitraan juga menunjukkan hasil yang bervariasi antar daerah. Beberapa daerah tergolong baik seperti Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta namun masih ada beberapa daerah yang mendapat nilai cukup bahkan kurang seperti pada: Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Indeks Tata Kelola ini mengukur aspek pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Terdapat banyak hal yang diamati yakni prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan

Sampai dengan saat ini penelitian mengenai pengaruh tata kelola terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal masih terbatas, terutama kajian mengenai apakah terdapat perbedaan capaian antara daerah dengan tata kelola yang baik dengan yang sebaliknya. Penelitian mengenai desentralisasi fiskal saat ini lebih banyak mengkaji mengenai pelaksanaan dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus dan pengaruhnya terhadap tujuan desentralisasi fiskal. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang melihat faktor utama penyebab belum optimalnya dampak desentralisasi fiskal yaitu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Masalah yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah: (1) Apakah tata kelola memiliki pengaruh terhadap hubungan antara Dana Alokasi Umum dan pertumbuhan ekonomi (2) apakah faktor lain (dalam hal ini tingkat pendidikan) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh tata kelola (*governance*) terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi daerah penerima dana dapat mengidentifikasi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan desentralisasi fiskal
2. Bagi pembuat kebijakan dapat merancang program penyaluran dana transfer daerah yang lebih efektif.

1.5 RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini, antara lain: (1) Desentralisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal atau pelimpahan kewenangan dalam hal sumber pendanaan (2) Penelitian ini akan menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen pada 2 kelompok propinsi dengan jumlah total kabupaten/kota sebanyak 75 dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2013 (3) Pengukuran pengaruh tata kelola diuji dengan membandingkan hasil pada kelompok daerah pada propinsi dengan tingkat tata kelola yang baik yaitu: Jawa Timur dan kelompok daerah pada propinsi dengan tingkat tata kelola yang buruk yaitu Papua dan Papua Barat. (4) Pengukuran tingkat tata kelola pemerintahan menggunakan *Indonesia Governance Index* yang dikeluarkan oleh kemitraan.or.id pada tahun 2012.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 KERANGKA TEORI

Teori *public choice* yang dipopulerkan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock (1962) pada prinsip melakukan pendekatan secara ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan politik terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan publik. Menurut Buchanan, teori *public choice* bukan semata metode maupun juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Pandangan ini berasal dari pengembangan dan penerapan alat dan metode ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan bersama dari berbagai kejadian-kejadian yang bersifat non pasar. Dalam Bahasa lain teori *public choice* adalah "*the economic study of non-market decision making*". Penerapan teori *public choice* dapat diaplikasikan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun digunakan sebagai indikasi dalam pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Obyek observasi *public choice* adalah pemilih (*voters*), partai politik (*political party*), politisi (*politician*), birokrat (*bureaucrat*), dan kelompok kepentingan (*other parties*), namun secara umum lebih banyak

diterapkan oleh oleh pakar-pakar politik. Buchanan menjelaskan bahwa konsep *public choice* sebagai teori yang luas, sebagai sebuah pandangan. Disebut sebagai "*public choice perspektive*" sehingga dalam pembahasan dan pemberian makna terhadap konsep *public choice* bisa membantu para analis untuk memperoleh fokus umum tentang konsep ini. *Public choice* merupakan sisi pandang untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan pengaplikasian alat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan bersama berdasarkan berbagai fenomena non pasar.

Berdasarkan teori *Public Choice*, desentralisasi fiskal memiliki 3 (tiga) manfaat yaitu:

1. Mendorong adanya daya tanggap instansi publik terhadap preferensi individu.
2. Menciptakan kemampuan memenuhi permintaan atas komoditas publik.
3. Menstimulasi penyediaan komoditas publik yang lebih memuaskan.

Sesuai teori di atas penelitian ini melakukan pemilihan variabel yang akan digunakan dalam model penelitian sebagai berikut:

1. Variabel tata kelola dan korupsi sebagai representasi dari manfaat desentralisasi fiskal menurut teori *public choice* yaitu mendorong adanya daya tanggap instansi publik terhadap preferensi individu. Hal ini disebabkan dari pemerintah yang memiliki tata kelola serta prinsip anti korupsi yang baik akan memunculkan kepekaan dalam memenuhi permintaan publik yang diwakilinya.
2. Variabel Belanja Modal sebagai keterwakilan dari manfaat desentralisasi untuk menciptakan kemampuan memenuhi permintaan atas komoditas publik. Tujuan belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan sarana dan fasilitas utamanya untuk pelayanan publik, sehingga dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan atas komoditas publik.
3. Variabel infrastruktur sebagai indikator dari penyediaan komoditas publik yang lebih memuaskan. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama bagi pembangunan dan merupakan salah satu komoditas publik yang utama. Melalui infrastruktur yang unggul maka penyediaan kebutuhan bagi publik akan semakin terjamin.

Musgrave (1959) membagi tiga fungsi pemerintah, yaitu:

1) Stabilisasi

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Tujuan utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah memelihara tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan seperti itu, maka "kebijakan stabilisasi" seringkali dikaitkan dengan pengaturan atas permintaan agregat agar untuk mencapai full employment dan stabilitas harga.

2) Alokasi

Pemerintah melakukan upaya dalam perekonomian untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Tindakan pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung seperti operasi pasar, maupun secara tidak langsung seperti dengan pengenaan pajak dan pemberian subsidi, yang mendorong maupun menghambat berbagai aktivitas lainnya.

3) Distribusi

Pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat sampai kepada pihak yang dituju, fungsi ini sering terkait dengan isu-isu seperti pemerataan dan efisiensi.

Berdasarkan fungsi pemerintah menurut Musgrave atas penelitian ini memilih variabel-variabel sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai simbol dari fungsi stabilisasi. Hal ini dikarenakan dengan pertumbuhan pendapatan domestik bruto yang baik maka fungsi pemerataan akan lebih besar kemungkinannya untuk terjadi.
2. Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah wujud fungsi alokasi yang dimiliki pemerintah. Tindakan pemerintah dalam pemberian alokasi DAU dan DAK merupakan intervensi langsung dari pemerintah dalam memastikan terjadinya perimbangan di antara pemerintah daerah.
3. Variabel Dana Insentif Daerah merupakan gambaran dari fungsi distribusi pemerintah. Dana ini diberikan dengan mekanisme *reward* bagi daerah-daerah yang memenuhi

indikator tertentu, sehingga hal ini merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam memastikan fungsi pelayanan public sampai kepada masyarakat yang diwakilinya dengan baik.

2.2 TINJAUAN EMPIRIK

Musgrave (1959) menyatakan bahwa peran pemerintah adalah untuk memastikan terciptanya alokasi efisien atas keuangan publik, mendorong stabilitas makro ekonomi serta menjadi instrument atas terjadinya redistribusi penghasilan. Saat ini, banyak Negara yang memutuskan untuk menerapkan desentralisasi fiskal sebagai upaya untuk mencapai tujuan di atas. Oates (1972) berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Tiebout (1956) dan Musgrave (1959) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal adalah langkah yang lebih efisien dikarenakan 2 (dua) alasan. Pertama, desentralisasi fiskal akan memberikan lebih banyak pilihan terhadap penyediaan layanan publik sehingga akan tersedia banyak alternatif sesuai selera publik atau lebih dikenal dengan sebutan argumen alokasi efisien. Alasan kedua, desentralisasi fiskal akan menghadirkan efisiensi produk terhadap penyediaan barang publik kepada masyarakat. Menurut Oates, dua alasan inilah yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Terdapat beberapa penelitian yang melihat hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya belum dapat disimpulkan. Dalam salah satu studi pionir mengenai belanja publik, Barro (1990) berkesimpulan bahwa pengeluaran negara tidak memiliki hubungan yang linier dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh dalam penelitian selanjutnya Barro (1991) berpendapat bahwa teori antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diuji secara empiris hubungan negatif dan tidak signifikan antara konsumsi publik, investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian terkini oleh Moreno-Dodson (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi setelah melakukan control terhadap variabel hambatan anggaran dan sumber pembiayaan.

Studi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap dampak ekonomis pun menunjukkan hasil yang bervariasi, terutama bagi Negara berkembang. Simatupang (2009) menemukan bahwa desentralisasi di Indonesia hanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap sektor pendidikan namun tidak untuk sektor kesehatan. Penelitian yang menunjukkan dampak positif

dari desentralisasi salah satunya diperlihatkan oleh Sabilla dan Jaya (2014). Penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional namun memiliki pengaruh positif juga terhadap tenaga kerja namun tidak berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Prud'homme (1995) juga berkesimpulan bahwa perbedaan dampak desentralisasi fiskal dikarenakan kurangnya kapabilitas serta lemahnya tata kelola (*governance*).

Peran tata kelola (*governance*) terhadap kinerja perekonomian menjadi isu utama dari beberapa studi. Studi Devarajan, Swaroop and Zou (1996) memperlihatkan bahwa peningkatan proporsi belanja lancar memberikan efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik Rajkumar and Swaroop (2008) menekankan pentingnya tata kelola dalam memberikan dampak positif atas belanja publik. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa pada Negara dengan tingkat tata kelola yang baik, belanja publik memberikan efek seperti yang diharapkan. Namun di Negara dengan tingkat tata kelola yang rendah, belanja publik tidak memberikan dampak yang sama.

Bahkan beberapa penelitian mengindikasikan perbedaan dampak desentralisasi fiskal terhadap capaian ekonomi atau daerah adalah disebabkan oleh lemahnya tata kelola (*governance*). Pepinsky and Wihardja (2010) menyoroti lemahnya tata kelola yang disebabkan oleh tidak adanya partisipasi masyarakat yang kuat merupakan penyebab kurangnya dampak desentralisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Lebih lanjut Pepinsky and Wihardja menyarankan agar lebih berhati-hati dalam pembuatan kebijakan berskala besar seperti desentralisasi ini, karena menurut mereka prasyarat keefektifan kebijakan desentralisasi harus didukung 3 (tiga) hal yaitu keseragaman kemampuan daerah, tingginya mobilitas modal dan tenaga kerja serta tingginya kesadaran akuntabilitas dari para pemimpin daerah. Patunru (2014) melakukan studi hubungan antara dampak dari tata kelola ekonomi daerah terhadap kinerja ekonomi daerah dengan

periode waktu setelah program desentralisasi diterapkan. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa: (1) tata kelola infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan indeks pembangunan manusia, (2) Hubungan Pemerintah-swasta yang baik juga memperlihatkan hasil yang sama, (3) opini laporan keuangan dari BPK juga menyajikan hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan (4) tata kelola dalam penganggaran khususnya penggunaan pada belanja modal yang lebih tinggi dan belanja pegawai yang Rajkumar and Swaroop (2008) lebih rendah memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peran tata kelola (*governance*) sangat signifikan terhadap tercapainya tujuan pembangunan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu inisiatif pemerintah untuk memasukkan unsur tata kelola dalam penyaluran dana ke daerah melalui program Dana Insentif Daerah merupakan langkah yang sangat baik. Namun pengembangan terhadap program Dana Insentif Daerah harus senantiasa dilakukan dengan memaksimalkan peluang yang ada serta mengelola tantangan yang muncul dengan lebih baik.

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh dari tata kelola terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pada hubungan antara program dan tujuan desentralisasi fiskal. Proksi yang digunakan untuk variabel program desentralisasi fiskal adalah program Dana alokasi Umum, sedangkan untuk tujuan desentralisasi fiskal diwakili oleh Produk Domestik Bruto. Representasi factor lain yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan desentralisasi fiskal adalah variabel tingkat literasi dari daerah yang menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan hasil studi-studi sebelumnya dari Rajkumar (2008), Pepinsky (2011) dan Patunru (2014) yang secara garis besar menyatakan terdapat pengaruh dari tata kelola dalam pencapaian tujuan desentralisasi fiskal maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₋₁ : Tidak ada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Produk Domestik Bruto.

H₁₋₁ : Ada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Produk Domestik Bruto.

Sedangkan hipotesis untuk model kedua yaitu:

H₀₋₂ : Tidak ada hubungan antara tingkat Literasi dengan Produk Domestik Bruto.

H₁₋₂ : Ada hubungan antara tingkat Literasi dengan Produk Domestik Bruto.

3. METODE PENELITIAN

3.1. JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini akan menggunakan perbandingan pengujian atas data sekunder dari 2 kelompok daerah (*control group*) dengan tingkat tata kelola (*governance*) yang berbeda. Untuk perwakilan propinsi dengan tata kelola baik adalah propinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota yang terpilih sebagai sampel. Daerah Jawa Timur memperoleh skor indeks tata kelola sebesar 6.43 atau kategori baik. 38 Kabupaten/kota dalam kelompok daerah Jawa Timur yaitu:

1	Tulungagung, Kab.	20	Malang, Kota
2	Tuban, Kab.	21	Malang, Kab.
3	Trenggalek, Kab.	22	Magetan, Kab.
4	Surabaya, Kota	23	Madiun, Kota
5	Sumenep, Kab.	24	Madiun, Kab.
6	Situbondo, Kab.	25	Lumajang, Kab.
7	Sidoarjo, Kab.	26	Lamongan, Kab.
8	Sampang, Kab.	27	Kediri, Kota
9	Probolinggo, Kota	28	Kediri, Kab.
10	Probolinggo, Kab.	29	Jombang, Kab.
11	Ponorogo, Kab.	30	Jember, Kab.
12	Pasuruan, Kota	31	Gresik, Kab.
13	Pasuruan, Kab.	32	Bondowoso, Kab.
14	Pamekasan, Kab.	33	Bojonegoro, Kab.
15	Pacitan, Kab.	34	Blitar, Kota
16	Ngawi, Kab.	35	Blitar, Kab.
17	Nganjuk, Kab.	36	Batu, Kota
18	Mojokerto, Kota	37	Banyuwangi, Kab.
19	Mojokerto, Kab.	38	Bangkalan, Kab.

Sedangkan kelompok daerah dengan tata kelola buruk adalah daerah Papua yang terdiri dari propinsi Papua dan Papua Barat. Propinsi Papua memperoleh skor indeks tata kelola sebesar 4.88 dan Papua barat dengan skor 4.48 yang termasuk dalam kategori buruk. 37 kabupaten/kota dari kelompok daerah Papua yang terpilih sebagai sampel. Yaitu:

1	Yalimo, Kab.	20	Jayapura, Kota
2	Yahukimo, Kab.	21	Jayapura, Kab.
3	Waropen, Kab.	22	Intan Jaya, Kab.
4	Tolikara, Kab.	23	Dogiyai, Kab.
5	Supiori, Kab.	24	Boven Digoel, Kab.
6	Sarmi, Kab.	25	Biak Numfor, Kab.
7	Puncak Jaya, Kab.	26	Asmat, Kab.
8	Pegunungan Bintang, Kab.	27	Teluk Wondama, Kab.
9	Nduga, Kab.	28	Teluk Bintuni, Kab.
10	Nabire, Kab.	29	Tambrau, Kab.
11	Mimika, Kab.	30	Sorong, Kota
12	Merauke, Kab.	31	Sorong, Kab.
13	Mappi, Kab.	32	Sorong Selatan, Kab.
14	Mamberamo Tengah, Kab.	33	Raja Ampat, Kab.
15	Mamberamo Raya, Kab.	34	Maybrat, Kab.
16	Lanny Jaya, Kab.	35	Manokwari, Kab.
17	Kepulauan Yapen, Kab.	36	Kaimana, Kab.
18	Keerom, Kab.	37	Fakfak, Kab.
19	Jayawijaya, Kab.		

Sumber data-data sekunder berasal dari:

1. Dana Alokasi Umum, Pendapatan Domestik Bruto dan Tingkat Literasi berasal dari *database* INDO DAPOER World Bank.
2. *Indonesian Governance Index* berasal dari kemitraan.or.id

3.2 MODEL PENELITIAN

Model penelitian yang akan digunakan adalah model yang sama untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen untuk kedua kelompok daerah, yaitu kelompok daerah kategori berindeks tata kelola baik dan kelompok daerah berindeks tata kelola buruk. Pengujian secara kelompok (*group*) untuk melihat dampak kondisi daerah terhadap variabel tertentu seperti pada penelitian Suryadarma (2012) yang melihat dampak korupsi terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

1. Model Penelitian 1:

$$PPDB_i = \beta_0 + \beta_1 DAU_i + \beta_2 LIT_i + \epsilon$$

Keterangan:

PPDB = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

DAU = Dana Alokasi Umum

LIT = Tingkat Literasi

i = area identifier

E = error term

2. Model Penelitian 2

$$PDB_i = \beta_0 + \beta_1 DAU_i + \beta_2 LIT_i + \epsilon$$

Keterangan:

PPDB = Produk Domestik Bruto

DAU = Dana Alokasi Umum

LIT = Tingkat Literasi

i = area identifier

E = error term

3.3 ALAT ANALISIS

Alat analisis akan menggunakan metode regresi linear berganda untuk data cross section dengan menerapkan pengujian pada model 1 dan 2 pada kelompok daerah dengan tata kelola yang baik (Jawa Timur) dan pada kelompok daerah dengan tata kelola yang buruk (Papua dan Papua Barat). Tahun pengujian adalah tahun 2012 dan 2013 dengan menggunakan acuan penilaian tata kelola (Indonesia Governance Index) dari lembaga Kemitraan hasil survey tahun 2012.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 HASIL PENGUJIAN MODEL 1

Hasil pengujian model 1 menunjukkan hasil bahwa:

- a. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola baik, hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

- b. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola baik, hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Literasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Hasil Pengujian Model 1 pada kelompok Tata Kelola Baik

Variabel	Coef	Std. Error	t	Keterangan
DAU	2.35	7.35	3.20	Signifikan
LIT	68047	25601	2.66	Signifikan
R Squared = 0.2982				
Adj. R Square = 0.2581				

- c. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola buruk, hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
- d. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola buruk, hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Literasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Hasil Pengujian Model 1 pada kelompok Tata Kelola Buruk

Variabel	Coef	Std. Error	t	Keterangan
DAU	7.93e-08	3.92e-07	0.20	Tidak Signifikan
LIT	2106.071	1596.349	1.32	Tidak Signifikan
R Squared = 0.0509				
Adj. R Square = 0.0049				

4.2 HASIL PENGUJIAN MODEL 2

Hasil pengujian model 2 menunjukkan hasil bahwa:

- a. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola baik, hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
- b. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola baik, hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Literasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

Hasil Pengujian Model 2 pada kelompok Tata Kelola Baik

Variabel	Coef	Std. Error	t	Keterangan
DAU	.0000354	.0000108	3.28	Signifikan
LIT	1002597	376357.5	2.66	Signifikan
R Squared = 0.3047				
Adj. R Square = 0.2650				

- c. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola buruk, hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
- d. Pada kelompok dengan tingkat tata kelola buruk, hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Literasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

Hasil Pengujian Model 2 pada kelompok Tata Kelola Buruk

Variabel	Coef	Std. Error	t	Keterangan
DAU	1.46e-06	2.22e-06	0.66	Tidak Signifikan
LIT	17245.32	9034.313	1.91	Tidak Signifikan
R Squared = 0.1113				

Adj. R Square = 0.0591

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh tata kelola (*governance*) terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal serta menganalisis factor lain terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. Berdasarkan hasil pengujian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola memiliki pengaruh bagi pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. Hal ini disimpulkan bahwa hanya dalam lingkungan dengan tata kelola yang baik maka Dana Alokasi Umum dapat memiliki kontribusi positif bagi Produk Domestik Bruto.
2. Faktor pendidikan yang representasikan dengan tingkat literasi memiliki hubungan positif terhadap tujuan desentralisasi fiskal yaitu Produk Domestik Bruto. Namun, hubungan ini hanya berlaku bagi daerah yang memiliki tata kelola yang baik.
3. Pengaruh tata kelola dan tingkat literasi secara positif berlaku secara konsisten baik untuk peningkatan Produk Domestik Bruto maupun peran atau sumbangan bagi pembentukan Produk Domestik Bruto.

5.2 SARAN

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai maka syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah dengan memperbaiki tata kelola dari pemerintahan daerah tersebut.
2. Kemampuan pendidikan manusia dalam mengelola pembangunan daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat pada daerah dimaksud. Oleh karena perbaikan tata kelola harus diiringi peningkatan taraf pendidikan baik bagi aparat pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya.

5.3 KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitianpenelitian selanjutnya yang diakibatkan:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data cross section selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 – 2017 untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel independen terhadap variable dependen.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) sampel daerah sebagai proksi dari daerah dengan tata kelola baik yaitu Jawa Timur dan daerah dengan tata kelola buruk yaitu Papua dan Papua Barat. Penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan data secara lebih luas dengan penggunaan panel data pada beberapa daerah di beberapa tahun observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Sunil Rajkumar, Vinaya Swaroop; Publik spending and outcomes: Does governance matter? ☆; Journal of Development Economics 86 (2008) 96–111
- Arianto A. Patunru dan Erman A. Rahman, Local Economic Governance and Outcomes in Indonesia, presentasi pada Forum Kajian Pembangunan, Aceh 11 Maret 2014
- Daniel Suryadarma, How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia; Bulletin of Indonesian Economic Studies 48 (1), 85-100 · 2012
- Kanetasya Sabilla¹, Wihana Kirana Jaya²; Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia; Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, April 2014, hlm.12-22
- Maryati, Ulfi dan Endrawati,; Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat; jurnal akuntansi & manajemen, 5 (2). Pp. 68-84.2010; Jurnal Ekonomi dan

Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, April 2014,
hlm.12-22

Thomas B. Pepinsky dan Maria M. Wihardja,
Decentralization and Economic Performance in
Indonesia; Journal of East Asian Studies · September
2011